



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh **Wajib Pajak Orang Pribadi Status Nihil** Menggunakan Coretax Form

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260209



Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

Terakhir diperbaharui 09-02-2026

Penyusun

Adi Wiyono

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda
Direktorat P2humas

Muhammad Iqbal Rahadian Syaefudin

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas

Zulfikar Irfial Chizli

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



**Siapa Wajib Pajak yang
berhak menyampaikan SPT
Tahunan melalui kanal
Coretax Form?**

-  **Wajib Pajak Orang Pribadi**
-  **Penghasilan dapat berasal dari Pekerjaan, Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas**
-  **SPT yang disampaikan berstatus Nihil**
-  **Tidak menggunakan Norma dalam menghitung Penghasilan Neto**

Yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Coretax Form

4

- ❑ Untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT, perlu menginstal aplikasi viewer **Adobe Acrobat Reader (Minimal Reader DC Versi 20)**
- ❑ Jika terdapat nilai selain Rp0,- pada **PPH KURANG/LEBIH BAYAR** di bagian Induk Halaman 2 poin 11a, maka SPT Coretax Form tidak dapat disampaikan.
- ❑ Beberapa isian dalam Coretax Form sudah terisi secara prefill dari berbagai sumber data. Beberapa isian data prefill tersebut ada yang editable, namun ada juga yang non-editable. Untuk data yang non-editable maka harus diupdate terlebih dulu dari sumber datanya (contoh: identitas WP, daftar keluarga).
- ❑ Terdapat delay sinkronisasi data selama 1 hari antara data portal Coretax dengan prefill data Coretax Form. Misal pemberi kerja baru membuat bukti potong hari ini, maka data bupot nya baru akan ter-prefill ke SPT Coretax Form pihak yang dipotong besok. Begitu juga dengan BPE SPT yang telah disampaikan melalui Coretax Form baru akan masuk datanya pada Portal Coretax setelah 1 hari.

Soal Latihan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi)

5

Pada kesempatan ini kita akan praktik membuat **SPT Tahunan PPh orang pribadi (status normal)** atas nama **Tuan A**, dengan batasan kondisi sesuai penjelasan bahwa **Tuan A**:

- ☐ bekerja pada **satu pemberi kerja** sebagai pegawai tetap yang bekerja selama satu tahun penuh sejak bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025 dan telah memiliki Bukti Potong BPA1 dari Perusahaan,
- ☐ penghasilan bruto yang diterima sebesar Rp533.500.000 dan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp82.875.000,
- ☐ Penghasilan istri dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto sebesar Rp140.000.000 dan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp6.180.000,
- ☐ Penghasilan dari usaha UMKM dengan omzet Rp1.200.000.000 dan telah melakukan pembayaran PPh Final UMKM sebesar Rp3.500.000,
- ☐ memiliki Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) **K/3** –Kawin dengan 3 tanggungan, Tuan A melaksanakan kewajiban perpajakan suami dan istri digabung,
- ☐ memiliki **harta** s.d akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar Rp300.000.000,- dan harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 harga perolehan Rp200.000.000,-,
- ☐ memiliki **hutang** s.d. akhir tahun pajak 2025 berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp200.000.000,-,
- ☐ tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan usaha UMKM di atas,
- ☐ tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah,
- ☐ tidak memiliki fasilitas pajak,
- ☐ tidak memiliki kredit pajak lain

PRAKTIK

TAHAP 1: LOGIN & PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG

Tahap Persiapan Dok. Pendukung



Apa saja dokumen yang harus disiapkan?

-  Dokumen Bukti Potong dari Pemberi Penghasilan
-  Dokumen Data Tanggungan dan Anggota Keluarga
-  Dokumen data Harta dan Utang
-  Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan



Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 370467 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

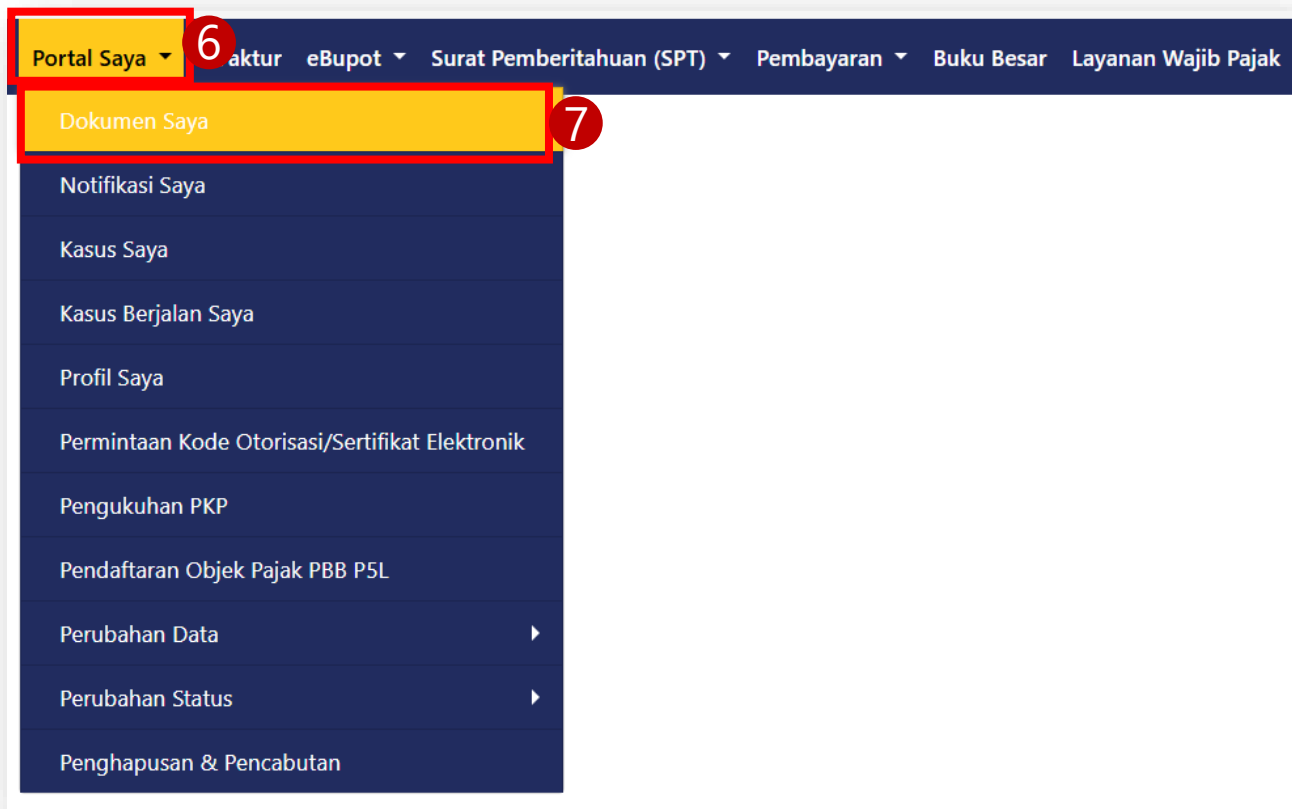
<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

- [1] ID Pengguna diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] Kata Sandi sesuai dengan **password Coretax**
- [3] Pemilihan Bahasa untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**



Tahap Persiapan Bukti Potong

9



Wajib Pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen Bukti Potong yang sudah diterbitkan oleh Pemotong Pajak Penghasilan pada portal Wajib Pajak

[6] Pilih **Portal Saya**

[7] Pilih **Dokumen Saya**

Tahap Persiapan Bukti Potong

10

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Per

 **Dokumen** Harap segarkan daftar dokumen () apabila tidak menemukan dokumen anda  Hasilkan Dokumen

8     

Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Judul Dokumen 9	Jenis Dokumen
	 		
2500002IV	03-07-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)	Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)
2500002M8	31-12-2025	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)	Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)

- [8]** Pilih lambang  agar muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal Wajib Pajak
- [9]** Silakan dipilih file yang akan diunduh
- [10]** Silakan **gulir kekanan** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong

Tahap Persiapan Bukti Potong

11

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

Dokumen Harap segarkan daftar dokumen () apabila tidak menemukan dokumen anda Hasilkan Dokumen Unggah Dokumen

Jenis Dokumen	Nomor Kasus	Tanggal Pembuatan	Pengguna Pembuatan	Aksi
		 		
Bukti Potong PPh Pasal 21 (BP21)		03-07-2025	-	Unduh
Bukti Potong PPh Pasal 21 A1 (BPA1)		31-12-2025	0024204638439000	11 Unduh

[11] Pilih **Unduh** untuk mengunduh Dokumen Bukti Potong A1 (BPA1)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN TIDAK FINAL	STATUS BUKTI PEMOTONGAN NORMAL
------------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------------

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP	:	1234567890123040	
A.2 Nama	:	Tuan A	
A.3 Alamat	:		
A.4 Jenis Kelamin	:	Pria	
A.5 Status PTKP	:	TK0	A.8 Nomor Paspor
A.6 Posisi	:	Staff	A.9 Kode Negara
A.7 Pegawai Asing	:	Tidak	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja
			:
			:
			:

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2 Objek Pajak	:	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2 Jenis Pemotongan	:	Kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan			

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
I	PENGHASILAN BRUTO	
1.	Gaji/Pensiun atau THR/HT	350.000.000
2.	Tunjangan PPh	0
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	0
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	0
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
7.	Tantem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	0
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	350.000.000
II	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO	
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	3.500.000
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	3.500.000
III	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	346.500.000
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	594.000.000
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	540.000.000
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	106.000.000
19.	PPh Pasal 21 Tertutang	61.833.333
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
21.	PPh Pasal 21 Tertutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikurangkan Pada SPT Tahunan)	61.833.333
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	54.000.000
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	7.833.333

B.E. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR	Tanpa Fasilitas
---	-----------------

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP/NIK	:	
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	
C.3 Nama Pemotong	:	
C.4 Tanggal	:	
C.5 Nama Penandatangan	:	
C.6 Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.

Berikut ini adalah contoh tampilan
Bukti Potong A1 (BPA1)

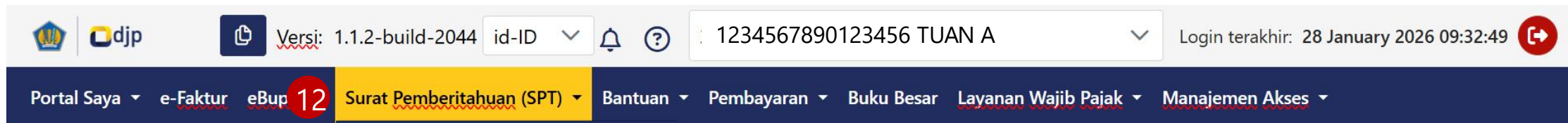
*Nilai yang tertera pada Bukti Potong hanya ilustrasi

PRAKTIK

TAHAP 2: PEMBUATAN KONSEP SPT

Tahap Pembuatan Konsep SPT

14



**JAGA DATA PRIBADI,
PERKUAT KEAMANAN
AKUN ANDA**

Lindungi diri Anda dari penyalahgunaan dengan langkah sederhana berikut:

- 1 Lindungi informasi pribadi, kata sandi dan kode OTP. Jangan pernah membagikan informasi ini kepada pihak tidak berwenang.
- 2 Gunakan kata sandi yang kuat dan hindari menyimpannya di perangkat atau browser atau perangkat lain.

- [12] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**
- [13] Pilih **Coretax Form**

Tahap Pembuatan Konsep SPT

15

14

Konsep SPT

SPT
Diunduh

SPT
Dilaporkan

SPT Gagal
Dilaporkan

Unduh
Viewer

Coretax Form

Beranda / Surat Pemberitahuan (SPT) / Coretax Form

SPT Belum Disampaikan

15
 Buat Konsep SPT

Refresh

[14] Pastikan sudah di menu **Konsep SPT**
[15] Pilih **Buat Konsep SPT**

Tahap Pembuatan Konsep SPT

16

1

Pilih Periode Pelaporan SPT

2

Pilih Jenis SPT



PERIODE SPT

Langkah 1. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

* Jenis Periode SPT

☐ SPT Bagian Tahun Pajak

☒ SPT Tahunan

* Tahun Pajak

17

2025

18

Lanjut

- [16] Pilih Jenis Periode SPT **SPT Tahunan**
- [17] Pilih Tahun Pajak **2025**
- [18] Pilih **Lanjut**

www.pajak.go.id

Tahap Pembuatan Konsep SPT

17

↓
SPT
Diunduh

✓
SPT
Dilaporkan

✗
SPT Gagal
Dilaporkan

↓
Unduh
Viewer



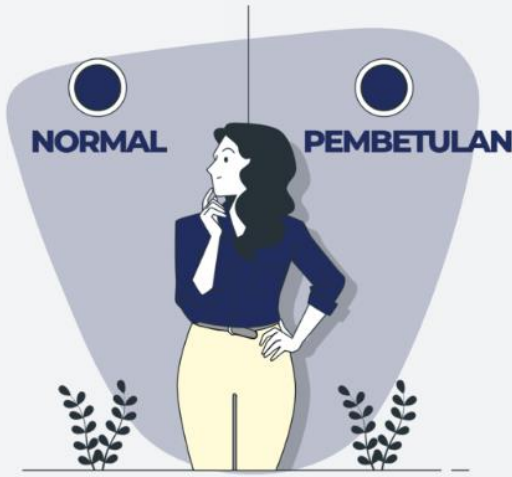
Buat Konsep SPT

✓ Pilih Periode Pelaporan SPT

2 Pilih Jenis SPT

NORMAL

PEMBETULAN



Langkah 2. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT : SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak : Tahun Pajak 2025

* Model SPT

19

Normal

[19] Pilih Model SPT **Normal**

[20] Pilih Buat Konsep

20

Buat Konsep

www.pajak.go.id

18



 **SPT**
Diunduh

 SPT Gagal
Dilaporkan

Unduh
Viewer



Apakah Anda yakin ingin memproses request unduh SPT ini?

Tidak

Ya

Refresh



SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 2025

21



Januari - Desember

Dibuat: 29-01-2026

Normal

- [21] Pilih icon Ajukan Request Download PDF
- [22] Konfirmasi Request Unduh, Jawab "Ya"

Tahap Pembuatan Konsep SPT

19

Coretax Form

23

Permintaan unduh berhasil dikirim. Silakan cek menu SPT Diunduh beberapa saat lagi.

NAMA3171070708530003
3171070708530003

Beranda / Surat Pemberitahuan (SPT) / Coretax Form

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

24

Refresh

SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang
Pribadi 2025

Januari - Desember

Dibuat: 29-01-2026

Normal

Buat Konsep SPT

Refresh

No data

[23] Muncul Notifikasi Permintaan unduh berhasil dikirim.

[24] Pilih **Refresh** sampai halaman Konsep SPT menjadi kosong-no data.

Tahap Pembuatan Konsep SPT

20

Coretax Form

Beranda / Surat Pemberitahuan (SPT) / Coretax Form



NAMA3171070708530003

3171070708530003

25

Konsep SPT



SPT
Diunduh



SPT
Dilaporkan



SPT Gagal
Dilaporkan



Unduh
Viewer



SPT



Masukkan Passphrase

Silakan masukkan passphrase untuk mengunduh PDF SPT.

27

Masukkan passphrase



Batal

28

OK



Refresh



SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang
Pribadi 2025

Unduh PDF SPT

26



Januari - Desember

Dibuat : 29-
01-2026

Diunduh : -

Normal

[25] Pilih Menu **SPT Diunduh**.

[26] Pilih icon Unduh PDF SPT.

[27] Masukkan passphrase sertifikat elektronik.

[28] Pilih OK. Simpan File di folder yang diinginkan.

Tombol ini digunakan untuk meminta Kembali kode verifikasi yang dikirimkan ke email terdaftar.

PRAKTIK

TAHAP 3: **PENGISIAN INDUK SPT**

BAGIAN A s.d. BAGIAN J



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE	STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
☒ 1. TAHUN PAJAK ☐ 2. BAGIAN TAHUN PAJAK 2 0 2 5	BULAN MULAI: 0 1 S.D. BULAN AKHIR: 1 2	☒ NORMAL ☐ PEMBETULAN	☒ PEKERJAAN 29 ☐ KEGIATAN USAHA ☐ PEKERJAAN BEBAS	☐ PEMBUKUAN STELSEL AKRUAL ☐ PEMBUKUAN STELSEL KAS ☒ PENCATATAN 30

[29] Bagi WP OP karyawan seperti pegawai swasta, PNS, Anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, silakan pilih Sumber Penghasilan "**Pekerjaan**"

[30] Pilih Metode Pembukuan "**Pencatatan**"

☐ Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya

A. Identitas WP

23

- ☐ Identitas Wajib Pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon dan Email berdasarkan profil wajib pajak
- ☐ Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT) **untuk kasus ini dikosongkan**
- ☐ NIK/NPWP Suami/Istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), **karena pada kasus ini dicontohkan kewajiban perpajakan suami dan istri digabung, maka kolom ini tidak terisi**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK

☒ 1. TAHUN PAJAK

☐ 2. BAGIAN TAHUN PAJAK

2 0 2 5

PERIODE

BULAN
MULAI

0 1

S.D.

BULAN
AKHIR

1 2

STATUS

☒ NORMAL

☐ PEMBETULAN

SUMBER PENGHASILAN

☒ PEKERJAAN

☐ KEGIATAN USAHA

☐ PEKERJAAN BEBAS

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP

3 1 7 1 0 7 0 7 0 8 5 3 0 0 0 3

2. NAMA

NAMA3171070708530003

3. JENIS ID

☒ KTP

☐ KITAS

☐ PASSPORT

4. NO.ID

3171070708530003

5. NO.TELEPON

08987852735

6. EMAIL

saptaka.adhi@gmail.com

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI

Silahkan Pilih

(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH atau MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)

NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

B. Ikhtisar Penghasilan Neto

24

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1	a	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN?	527.500.000
31		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☒ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 1 Bagian D
	b	1) APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS?	
32		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c)	
		☒ Ya. (Lanjut ke Pertanyaan selanjutnya)	
		2) APAKAH ANDA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU ATAU ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)?	
33		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☒ Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A , lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 3B Bagian A
		☐ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B , lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
		3) APAKAH ANDA MENGGUNAKAN NORMA DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN NETO?	
34		☐ Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☒ Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan 1c)	
		☐ Ya, saya berhak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A , lalu lanjut ke pertanyaan 1c)	
		4) ANDA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, SEBUTKAN SEKTOR USAHA YANG ANDA LAKUKAN.	
		☐ Dagang. (Isi Lampiran 3A-1 , lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Jasa. (Isi Lampiran 3A-2 , lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Industri. (Isi Lampiran 3A-3 , lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
		5) PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS	0
	c	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA?	
35		☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B , lalu ke pertanyaan selanjutnya)	
	d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?	
36		☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
		☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C , lalu ke pertanyaan selanjutnya)	

- [31] Pilih Ya
- [32] Pilih Ya
- [33] Pilih Ya (urutan 2)
- [34] Pilih Tidak (urutan 2)
- [35] Pilih Tidak
- [36] Pilih Tidak

Bagian Induk akan menentukan Lampiran yang akan muncul pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul

C. Perhitungan Pajak Terutang

25

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2	PENGHASILAN NETO SETAHUN	(1a + 1b + 1c + 1d)	37	527.500.000
3	APAKAH TERDAPAT PENGURANGAN PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?			
38	☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)			
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			
4	PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO	(2 - 3)	39	527.500.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	40 K/3	41	72.000.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	42	455.500.000
7	PPh TERUTANG			82.875.000
8	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?			
43	☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)			
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			
9	PPh TERUTANG SETELAH PENGURANGAN PPh TERUTANG	(7 - 8)	44	82.875.000

[37] Penghasilan netto setahun akan **terisi oleh sistem**

[38] Pilih **Tidak**

[39] Penghasilan netto setelah pengurangan penghasilan netto akan **terisi oleh sistem**

[40] Pilih PTKP yang sesuai, untuk kasus ini pilih **K/3**

[41] Penghasilan Kena Pajak akan **terisi oleh sistem**

[42] PPh terutang akan **terisi oleh sistem**

[43] Pilih **Tidak**

[44] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan **terisi oleh sistem**

D. KREDIT PAJAK

10

a

APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?

82.875.000

☐ Tidak. (lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☒ Ya. (Isi **Lampiran 1 Bagian E**, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Lampiran 1 Bagian E

b

ANGSURAN PPh PASAL 25

46

0

c

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

47

0

d

APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?

☒ Tidak. (lanjut ke pertanyaan selanjutnya)

☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)

© TIK 2026

- [45] Pilih **Ya**
- [46] Untuk kasus ini tidak ada prefill data
- [47] Untuk kasus ini tidak diisi
- [48] Pilih **Tidak**

E. PPh Kurang/Lebih Bayar

27

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11	a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	49	0
	b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK			
50	☒	Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)			
	☐	Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			
	c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(11a - 11b)	51	0

[49] Akan terisi oleh sistem

[50] Akan terisi oleh sistem sesuai dengan data pada Coretax

[51] Akan terisi oleh sistem

F. Pembetulan & G. Permohonan Pengembalian

28

F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12 a PPh KURANG/LEBIH BAYAR PADA SPT YANG DIBETULKAN

☐ GANTI SPT SEBELUMNYA

b PPh KURANG/LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN

(11a - 12a)

0

G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh KURANG/LEBIH BAYAR

- ☐ Dikembalikan melalui pemeriksaan,
- ☐ Dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan

NOMOR REKENING

NAMA BANK

NAMA PEMILIK REKENING

- ☐ Induk Bagian F akan terisi jika status SPT Tahunan Wajib Pajak Kurang/Lebih Bayar
- ☐ Induk Bagian G dilengkapi jika status SPT Tahunan Wajib Pajak Lebih Bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP
- ☐ **Sesuai dengan contoh kasus maka bagian ini silakan dilewati**

H. Angsuran PPh Pasal 25

29

H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

13 a APAKAH ANDA HANYA MENERIMA PENGHASILAN TERATUR DAN BERKEWAJIBAN MENBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

- 52** ☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25-nya adalah

(1 / x (9 - 10a)

b APAKAH ANDA MENYUSUN PERHITUNGAN TERSENDIRI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

- 53** ☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)
☐ Ya. (Isi **Lampiran 4 Bagian A**)

c APAKAH ANDA MEMBAYAR ANGSURAN PPh PASAL 25 OPPT TAHUN PAJAK BERIKUTNYA?

- 54** ☒ Tidak, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25
☐ Ya, angsuran PPh Pasal 25 saya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

[52] Pilih **Tidak**

[53] Pilih **Tidak**

[54] Pilih **Tidak**

I. Pernyataan Transaksi Lain

30

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14	a	HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK (Isi Lampiran 1 Bagian A)	Lampiran 1 Bagian A	500.000.000
	b	APAKAH ANDA MEMILIKI UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK?		200.000.000
55		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya)		
		☒ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 1 Bagian B	
	c	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?		140.000.000
56		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya)		
		☒ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 2 Bagian A	
	d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?		
57		☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya)		
		☐ Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
	e	APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA PENYUSUTAN DAN/ATAU AMORTISASI FISKAL?		
58		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya)		
		☐ Ya. (Isi Lampiran 3C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
	f	APAKAH ANDA MELAPORKAN BIAYA ENTERTAINMENT, BIAYA PROMOSI, PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, SERTA PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH?		
59		☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya)		
		☐ Ya. (Isi Lampiran 3D, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
	g	APAKAH ANDA MENERIMA DIVIDEN DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DARI LUAR NEGERI DAN MELAPORKANNYA SEBAGAI PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?		
60		☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan berikutnya)		
		☐ Ya. (Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah)		
	h	KELEBIHAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DAPAT DIMINTA PENGEMBALIAN		0
61				

[55] Pilih **Ya**
[56] Pilih **Tidak**
[57] Pilih **Tidak**
[58] Terisi oleh sistem
[59] Terisi oleh sistem
[60] Pilih **Tidak**
[61] Terisi oleh sistem

J. Lampiran Tambahan

31

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a	LAPORAN KEUANGAN/LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT	62	☒ TIDAK	☐ YA	Unggah		X	File .pdf Max 20MB
b	BUKTI PEMBAYARAN ZAKAT/SUMBANGAN KEWAJIBAN KEAGAMAAN	63	☒ TIDAK	☐ YA	Unggah		X	File .pdf Max 5MB
c	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN SEHUBUNGAN DENGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	64	☒ TIDAK	☐ YA	Unggah		X	File .pdf Max 5MB
d	SURAT KUASA KHUSUS	65	☒ TIDAK	☐ YA	Unggah		X	File .pdf Max 5MB
e	DOKUMEN LAINNYA	66	☒ TIDAK	☐ YA	Unggah		X	File .pdf Max 5MB

[62 s.d. 66] Pilih **No**

PRAKTIK

TAHAP 4: **PENGISIAN LAMPIRAN**

LAMPIRAN-1

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

34

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/ INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang tunai/Bank Note	-	Tuan A	-	Indonesia	2024	300.000.000	
JUMLAH TABEL 1							1	300.000.000

2

3

1

TAMBAH

HAPUS

Data ke-

1

Rows

1

To

1

Of

1

[1] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun

[2] Pilih deskripsi kas dan setara kas

Uang tunai/Bank Note/K
Tabungan(Bank/Lembag
Giro
Deposito
Uang elektronik
Cek
Wesel
Commercial Paper
Setara kas lainnya

[3] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

35

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/ INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang tunai/Bank Note ▾	-	Tuan A	-	Indonesia ▾	2024	300.000.000	▾
Jumlah Tabel 1								
							1	300.000.000

TAMBAH

HAPUS

Data ke- 1

Rows 1 To 1 Of 1

- [4] Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening
- [5] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan

[6] Pilih negara tempat Kas →

Indonesia

Aruba

Afghanistan

Angola

Anguilla

Kepulauan Aland

Albania

Andorra

Uni Emirat Arab



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

36

1. KAS DAN SETARA KAS

KODE	DESKRIPSI	NOMOR AKUN	ATAS NAMA	NAMA BANK/ INSTITUSI	LOKASI HARTA	TAHUN PEROLEHAN	SALDO	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0101	Uang tunai/Bank Note ▾	-	Tuan A	-	Indonesia ▾	2024	300.000.000	▾
JUMLAH TABEL 1						1	300.000.000	

TAMBAH

HAPUS

Data ke-

1

Rows

1

To

1

Of

1

- [7] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas
- [8] Diisi dengan nilai nominal saldo
- [9] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

-
Harta PPS
Harta Investasi PPS



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

37

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0403	TIPE :	13 B 1234 OKE	☒ ATAS NAMA SENDIRI		2025	200.000.000	200.000.000
	Mobil Penumpang		☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN				
	MEREK/MODEL :		NIK/NPWP	3171070708530003			
	TOYOTA 86		NAMA	NAMA3171070708530003			
JUMLAH TABEL 4				4	200.000.000	200.000.000	

Sepeda

Sepeda Motor

Mobil Penumpang

Bus

Kendaraan Angkutan

Kendaraan Tujuan Kh

Kereta

Pesawat Terbang

Kapal

10

TAMBAH

HAPUS

Data ke-

1

Rows

1

To

1

Of

1

- [10] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
- [11] Pilih tipe harta bergerak
- [12] Diisi dengan merek/model harta bergerak
- [13] Diisi dengan nomor polisi/registrasi harta bergerak



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

*Seluruh data harta wajib diisi
* Kolom "Keterangan" jika harta terkait PPS

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

4. HARTA BERGERAK

KODE	DESKRIPSI	NOMOR POLISI/ REGISTRASI	KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI	KETERANGAN (HARTA PPS/HARTA INVESTASI PPS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0403	TIPE :	B 1234 OKE	☒ ATAS NAMA SENDIRI	2025	200.000.000	200.000.000	
	Mobil Penumpang		☐ ATAS NAMA PIHAK LAIN				
	MEREK/MODEL :		NIK/NPWP 3171070708530003				
	TOYOTA 86		NAMA NAMA3171070708530003				
Jumlah Tabel 4				4	200.000.000	200.000.000	

TAMBAH

HAPUS

Data ke- 1

Harta PPS
Harta Investasi PPS

- [14] Pilih atas nama kepemilikan harta
- [15] Diisi dengan NIK/NPWP serta nama Pemilik harta
- [16] Diisi dengan tahun perolehan harta bergerak
- [17] Diisi dengan harga perolehan harta bergerak
- [18] Diisi dengan nilai harta pada akhir tahun pajak
- [19] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

39

7. IKTISAR HARTA

DESKRIPSI		HARGA PEROLEHAN	NILAI SAAT INI
(1)		(2)	(3)
JUMLAH TABEL 7	7	500.000.000	500.000.000

Iktisar Harta menampilkan rekapitulasi keseluruhan dari harta yang sudah diisi pada Bagian A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak **tabel 1** sampai dengan **tabel 6**



Jumlah Harta **Tabel 7 Kolom (2)** akan dipindahkan Ke **Induk Bagian I Angka 14 Huruf a.**

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

KODE	DESKRIPSI	KREDITUR		NEGARA KREDITUR	TAHUN PINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
		NIK/NPWP					
		NAMA					
JUMLAH TABEL 8					8		

20

TAMBAH

HAPUS

Data ke-1

Rows1To1Of1

[20] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun

*Seluruh data Utang wajib diisi

* Isi Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

! Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan sisa utang pada akhir tahun pajak yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga)

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

41

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

KODE	DESKRIPSI	KREDITUR		NEGARA KREDITUR	TAHUN PINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
101	Utang Bank / Lembaga Keu	NIK/NPWP	000000000000000000	Indonesia	2025	200.000.000	
		NAMA	MANDIRI				
JUMLAH TABEL 8					8	200.000.000	

20

TAMBAH

HAPUS

Data ke-

1

Rows

1

To

1

Of

1

[20] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun

*Seluruh data Utang wajib diisi

* Isi Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS



Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan sisa utang pada akhir tahun pajak yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga)

C. Daftar Anggota Keluarga

42

C. DAFTAR KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IBU TIGA ANAK	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	30-11-1989	ISTRI	PNS
ANAK 1	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	30-11-2013	ANAK	TIDAK BEKERJA
ANAK 2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	30-11-2016	ANAK	TIDAK BEKERJA
ANAK 3	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	30-11-2019	ANAK	TIDAK BEKERJA

- ☐ Daftar Anggota Keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP
- ☐ Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga
- ☐ **Dalam kasus Tuan A, PTKP K/3**
- ☐ Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data**

Menu Perubahan Data

Portal Saya>>Profil Saya>>Informasi Umum>>Edit>>Unit Pajak Keluarga

D. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

NO	NAMA PEMBERI KERJA	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. MUDAH	2345678901234567	533.500.000	6.000.000	527.500.000
JUMLAH TABEL D					527.500.000

PINDAHKAN JUMLAH TABEL D KE INDUK BAGIAN B ANGKA 1 HURUF a.

TAMBAH

HAPUS

21

Data ke-

1

Rows

1

To

1

Of

1



- ☐ Tabel Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1 dari Pemberi Kerja Tuan A dan Istri Tuan A
- ☐ Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan
- ☐ **Dalam kasus:**
 - **Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan Ph. Bruto Rp.533.500.000 dan Ph. Neto Rp.527.500.000**
 - **Istri Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto sebesar Rp140.000.000 dan Ph. Neto Rp.135.200.000 yang harus dihapus dan dipindahkan ke Lampiran 2 bagian A (Istri Gabung Suami) dengan klik tombol Hapus [21]**
- ☐ Nilai Ph. Neto 527.500.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian B Angka 1 Huruf a.

E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh

44

NO	PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP	2345678901234567	NOMOR	1	PPh Pasal 21 ▼	533.500.000	82.875.000
	NAMA	PT. MUDAH	TANGGAL	30-01-2026			
JUMLAH KREDIT PAJAK DALAM NEGERI						16	82.875.000
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI (DIISI DARI LAMPIRAN 2 JUMLAH TABEL C.10)						17	0
JUMLAH TABEL E (16) + (17)						E	82.875.000

PINDAHKAN JUMLAH TABEL E KE INDUK BAGIAN D ANGKA 10 HURUF a.

TAMBAH

HAPUS

22

Data ke-

1

Rows

1

To

1

Of

1

- ☐ Tabel Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BPA1 dari Pemberi Kerja
- ☐ Apabila memiliki Bukti Pemotongan/Pemungutan Lain, Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data.
- ☐ **Dalam kasus:**
 - Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar Rp87.375.000
 - Istri Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar Rp6.180.000 yang harus dihapus dan dipindahkan ke Lampiran 2 bagian A (Istri Gabung Suami) dengan klik tombol Hapus [22]
- ☐ Jumlah Kredit Pajak Pajak Dalam Negeri Rp82.875.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian D Angka 10 Huruf a.

LAMPIRAN-2 Bagian A

A. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

46

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh	KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIK/NPWP :				
	NAMA :				
JUMLAH TABEL A			A		

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (5) KE BAGIAN INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF c.

23

TAMBAH

HAPUS

Data ke-

1

- ☐ Dalam Kasus Istri gabung suami (Tuan A) maka data penghasilan istri pada Lampiran 1 huruf D dan data bukti pemotongan pada Lampiran 1 huruf E (DPP Rp140.000.000 dan PPh Terutang Rp6.180.000 dipindahkan ke lampiran 2 huruf A ini
- ☐ Penambahan data dilakukan dengan klik tombol **Tambah** [23]
- ☐ Pastikan jenis penghasilan pada kolom 4 yang dipilih adalah "**Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh Kepala Keluarga**" sehingga kode pada kolom 3 akan terisi "**28-499-99**"
- ☐ Jumlah Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final Rp140.000.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian I Angka 14 Huruf c.

A. Penghasilan yang dikenakan PPh Bersifat Final

47

A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PPh		KODE	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPh TERUTANG
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIK/NPWP	3456789012345678	28-499-99	Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang h	140.000.000	6.180.000
	NAMA	PT. ANDAL				
JUMLAH TABEL A				A	140.000.000	6.180.000

PINDAHKAN JUMLAH TABEL A KOLOM (5) KE BAGIAN INDUK BAGIAN I ANGKA 14 HURUF c.

23

TAMBAH

HAPUS

Data ke-

1

- ☐ Dalam Kasus Istri gabung suami (Tuan A) maka data penghasilan istri pada Lampiran 1 huruf D dan data bukti pemotongan pada Lampiran 1 huruf E (DPP Rp140.000.000 dan PPh Terutang Rp6.180.000 dipindahkan ke lampiran 2 huruf A ini
- ☐ Penambahan data dilakukan dengan klik tombol **Tambah** [23]
- ☐ Pastikan jenis penghasilan pada kolom 4 yang dipilih adalah **"Penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh Kepala Keluarga"** sehingga kode pada kolom 3 akan terisi **"28-499-99"**
- ☐ Jumlah Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final Rp140.000.000 akan dipindahkan ke Induk SPT Bagian I Angka 14 Huruf c.

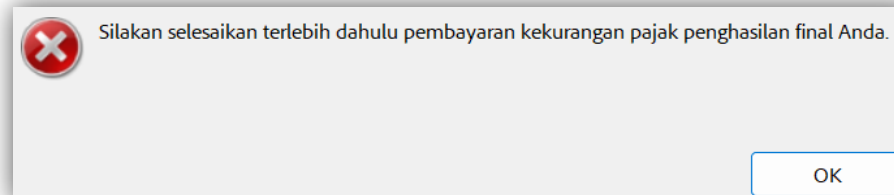
LAMPIRAN-3B Bagian A

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

49

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN														
NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	33333333333333333333 - CABA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rows 3 To 3 Of 3 PREV														
a.	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500.000.000												500.000.000
d.	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h.	SELISIH (e-f-g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i.	SELISIH KARENA PEMBETULAN													0
j.	SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN (h-i)													0

- [23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)
- [24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
*telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur
- [25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000)



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

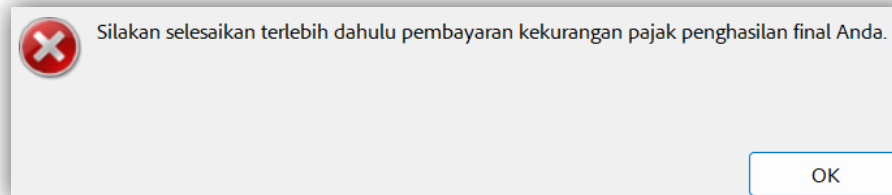
50

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN														
NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	33333333333333333333 - CAB	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
Rows 3 To 3 Of 3 PREV														
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500.000.000												500.000.000
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	700.000.000
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. SELISIH (e-f-g)		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
i. SELISIH KARENA PEMBETULAN														0
j. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN (h-i)														0

[23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)

[24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
*telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur

[25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000)



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

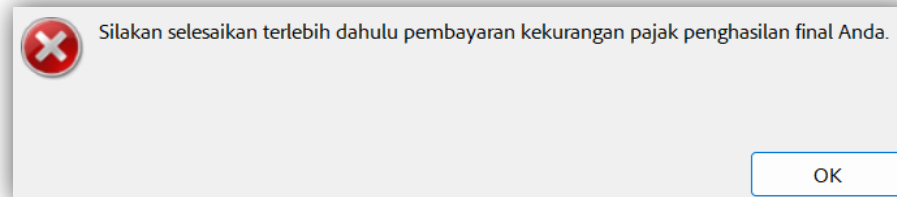
51

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN														
NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	33333333333333333333 - CAB	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
Rows 3 To 3 Of 3 PREV														
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500.000.000												500.000.000
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	700.000.000
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h. SELISIH (e-f-g)		0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000
i. SELISIH KARENA PEMBELTAN														0
j. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN (h-i)														0

[23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)

[24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
*telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur

[25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000)



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WP OP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

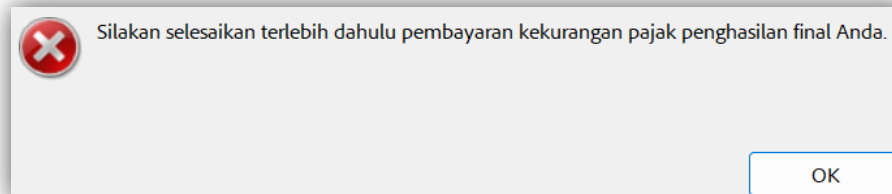
52

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIP PAJAK ORANG PROBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAKAN														
NO	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	33333333333333333333 - CAB	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
Rows 3 To 3 Of 3 PREV														
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
b. AKUMULASI PEREDARAN BRUTO		100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	
c. PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK		500.000.000												500.000.000
d. PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK		0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	700.000.000
e. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0.5% x d)		0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
f. JUMLAH PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI		0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000
g. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT PIHAK LAIN		0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000
h. SELISIH (e-f-g)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. SELISIH KARENA PEMBETULAN														0
j. SELISIH PADA SPT YANG DIBETULKAN (h-i)														0

[23] Diisi dengan nominal peredaran bruto di tiap masa pada tahun pajak dilaporkan (sesuai contoh kasus: @Rp100.000.000 dengan Total Rp1.200.000.000)

[24] Diisi dengan PPh Final yang telah disetor sendiri (sesuai contoh kasus: @Rp300.000 di masa Juni s/d Desember dengan Total Rp2.100.000)
*telah melewati threshold Rp500.000.000 bagi WP Orang Pribadi sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur

[25] Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong dan disetor oleh pihak lain (sesuai contoh kasus: @Rp200.000 di masa Juni s/d Desember dengan total Rp1.400.000)



"notifikasi timbul untuk mengingatkan bahwa data nominal yang diinput agar diselesaikan penyetorannya terlebih dahulu."

PRAKTIK

TAHAP 5: PENGECEKAN NILAI PADA INDUK SPT

Pengecekan Nilai Pada Induk

54

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2	PENGHASILAN NETO SETAHUN	(1a + 1b + 1c + 1d)	527.500.000
3	APAKAH TERDAPAT PENGURANGAN PENGHASILAN NETO SEPERTI KOMPENSASI KERUGIAN ATAU ZAKAT/ SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYAR SELAIN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN DALAM FORMULIR BPA1 DAN/ATAU BPA2?		
	☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
4	PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	(2 - 3)	527.500.000
5	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	K/3	72.000.000
6	PENGHASILAN KENA PAJAK	(4 - 5)	455.500.000
7	PPh TERUTANG		82.875.000
8	APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG?		
	☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
9	PPh TERUTANG SETELAH PENGURANGAN PPh TERUTANG	(7 - 8)	82.875.000

D. KREDIT PAJAK

10 a	APAKAH TERDAPAT PPh YANG TELAH DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN?	82.875.000
	☐ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	☒ Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	Lampiran 1 Bagian E
b	ANGSURAN PPh PASAL 25	0
c	STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	0
d	APAKAH ANDA MENERIMA PENGEMBALIAN/PENGURANGAN KREDIT PPh LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN?	
	☒ Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)	
	☐ Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri)	

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11 a	PPh KURANG/LEBIH BAYAR	(9 - 10a - 10b - 10c + 10d)	0
b	APAKAH TERDAPAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK		
	☒ Tidak, saya tidak memilikinya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya)		
	☐ Ya, saya memilikinya. (Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda, lalu ke pertanyaan selanjutnya)		
c	PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR	(11a - 11b)	0



- ☐ Pastikan nilai pada bagian C.9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang = D.10a
Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain
- ☐ Apabila **C.9 = D.10a** maka Nilai E.11a PPh kurang/lebih bayar akan 0 (Nihil)
- ☐ Dalam kasus Tuan A, **C.9 = D.10 = Rp82.875.000**
- ☐ SPT Tahunan Orang Pribadi Tuan A Status Nihil, siap dilakukan pelaporan

PRAKTIK

TAHAP 6: **PENYAMPAIAN SPT**

Bagian Induk Pernyataan

56

K. PERNYATAAN

1



DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DIATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PENANDA TANGAN



WAJIB PAJAK



WAKIL/KUASA

NIK/NPWP

3 1 7 1 0 7 0 7 0 8 5 3 0 0 0 3

NAMA LENGKAP

NAMA3171070708530003

TANGGAL BULAN TAHUN

2

03-02-2026

TANDA TANGAN

© TIK 2026

- [1] Centang pernyataan kebenaran pengisian data
- [2] diisi dengan tanggal penandatanganan SPT

Tahap Pengiriman SPT Tahunan Orang Pribadi

57

NPWP	<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	3	1	7	1	0	7	0	7	0	8	5	3	0	0	0	3
3	1	7	1	0	7	0	7	0	8	5	3	0	0	0	3		
NAMA WAJIB PAJAK	NAMA3171070708530003																
JENIS SPT	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi																
TAHUN PAJAK	2025																
PERIODE PAJAK	01 s.d 12																
KODE VERIFIKASI	3 IPY7B0 4 SUBMIT																

[3] Diisi dengan kode verifikasi yang dikirim ke email terdaftar
*kode verifikasi dikirim Ketika konsep SPT berhasil dibuat

[4] Klik **Submit**

Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP	Nama Objek Pajak
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾		
	PPH Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari – Desember 2025		

<

1

>

10 ▾

- ☐ SPT Tahunan PPh OP Tuan A yang telah dilaporkan dapat diakses melalui aplikasi Coretax Form
- Pilihan  untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan
- ☐ Pilihan  untuk melakukan unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
- ☐ Pilihan  untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan

www.pajak.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GKN I LT. 1, MAKASSAR, 90232
TELEPON (0411) 441680; FAKSIMILE (0411) 441260; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; Informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00048/KPP.1502/2026
Tanggal: 20 Januari 2026

NPWP	: 1234567890123456	Tanggal Terima SPT	: 20 Januari 2026
Nama Wajib Pajak	: TUAN A	Tahun Pajak	: 2025
Jenis SPT	: SPT Tahunan Orang Pribadi	Masa Pajak	: Januari-Desember 2025
Status SPT	: Normal	Saluran	: Portal Wajib Pajak



Contoh tampilan Bukti Penerimaan Elektronik atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id